

Dekonstruksi Paradigma Pendidikan (Mengafirmasi Pendidikan Berbasis Multikulturalisme)

MUSLIM BASYAR
Universitas Muhammadiyah Lampung
Email: muslimbasyar@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini secara umum akan membahas ihwal disparitas antara “keagungan” teori pendidikan (*das sollen*) dengan prakteknya secara nyata (*das sein*). Tujuan yang ingin diperoleh adalah untuk melihat sejauh mana pendidikan (agama) mampu membentuk manusia menjadi pribadi yang dewasa, sehingga bisa menurunkan tensi kesenjangan sosial yang saat ini kian menganga. Metode dan pendekatan yang dilakukan adalah analisis data dan dokumen berupa literatur akademik (studi pustaka). Dari hasil analisa menunjukkan bahwa praktek dalam dunia pendidikan (agama) kita belum mampu menjadikan pendidik dan peserta didik sebagai relasi yang setara, bersama-sama menjadi subjek; bukan sebagai patron-klien. Wajar, jika *out put* yang dihasilkan dari “ruang kelas” malah menjadi bagian dari praktek kekerasan dan ketidakadilan; yang kini kian jadi momok di negeri ini.

Kata kunci: dekonstruksi, humanisme, pendidikan multikultural

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dan kehidupan manusia bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang yang sama: tak bisa terpisahkan. Hubungan keduanya pun ibarat tubuh dengan jiwa. Jiwa berpotensi menggerakkan tubuh; sementara kehidupan manusia digerakkan oleh pendidikan agar mencapai tujuan hidup yang didambakan. Karena dengan pendidikan, manusia akan bisa memperoleh wawasan luas perihal kehidupan yang tengah dilakoninya. Tanpa pendidikan, bisa dipastikan manusia akan kehilangan ruh penggerak kehidupannya. Dengan kata lain, kehidupan seseorang akan benar-benar berarti jika pendidikan benar-benar hidup.

Namun, sayangnya, kenyataan yang kini mengemuka menunjukkan bahwa pendidikan di negeri ini masih jauh panggang dari api. Proses pengayaan yang seyogianya mampu memanusiakan manusia, malah kian membuat masyarakat kita bodoh dan acap merayakan budaya kekerasan.

Dengan demikian, berbincang ihwal pendidikan, sama halnya membicarakan tentang kehidupan. Sebab, pendidikan merupakan proses yang dilakukan setiap individu menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi kemanusiaannya. Dan proses itu akan berhenti ketika nyawa sudah tidak ada dalam raga manusia. Maka, benarliah kata Paulo Freire, praktisi pendidikan

berkebangsaan Brasil, bahwa pendidikan merupakan proses pembebasan dan upaya membangkitkan kesadaran kritis bagi setiap insan.¹

Karenanya, semua perlakuan yang ada dalam praktek pendidikan, mestinya selalu memperhatikan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan dengan fitrah yang dimilikinya: sebagai makhluk individu yang khas dan makhluk sosial yang hidup dalam realitas sosial yang majemuk. Artinya, pemahaman yang utuh tentang karakter manusia wajib dilakukan sebelum proses pendidikan dilaksanakan.

Aktivitas pendidikan sejak awal telah menjadi cara bertindak dari sebuah masyarakat. Dengan pendidikan, para pendahulu melanggengkan warisan budaya mereka. Kepada generasi yang lebih muda, mereka mewariskan nilai-nilai yang menjadi bagian penting dari kultur masyarakat. Jika tidak ada proses pewarisan itu, nilai-nilai yang menghidupi kebudayaan masyarakat pun akan terancam punah. Karena itu, pendidikan mempunyai peran vital yang tidak hanya menentukan keberlangsungan hidup suatu masyarakat, tapi juga mengukuhkan identitas mereka.²

Namun demikian, belakangan ini pendidikan kita dikeluhkan tanpa visi dan tujuan yang jelas. Berbagai macam perubahan dalam bidang pendidikan, justru semakin membebani peserta didik. Ditambah lagi dengan situasi sosial-kultural masyarakat kita yang akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan, dengan makin gamblangnya beragam peristiwa yang kian merendahkan harkat dan martabat manusia.

Selain mempertanyakan hasilnya berupa sumberdaya manusia yang siap pakai, belakangan ini pendidikan juga ditagih akan tanggung jawabnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Tingginya pelanggaran moral dalam masyarakat, buruknya etika kehidupan dan tensi kesenjangan sosial yang menganga, serta korupsi yang kian merajalela, menyebabkan orang bertanya akan tanggung jawab dari pendidikan kita.

Banyak penyebab mengapa pendidikan dalam konteks lokal tidak mampu memelihara nilai-nilai lokalnya sendiri yang sebenarnya amat luhur bagi pembentukan jati diri bangsa. Sedangkan dalam konteks global, kita seperti anak ayam yang kehilangan induk. Memang, dari segi tradisi pendidikan, jika dibandingkan dengan negara-negara maju, kita memiliki tradisi yang cukup muda. Sebab, perencanaan pendidikan baru dilaksanakan pada pertengahan abad 20. Dan sebelumnya, kita tengah sibuk dengan perang dan pergulatan fisik mencapai kemerdekaan.³

Karena itu, perhatian terhadap pembangunan bangsa kini tampaknya harus lebih intensif dan seksama dalam tindak-lanjutnya. Setidaknya dengan mempertimbangkan bahwa eksekris multidimensi di negeri ini telah menyebabkan kebangkrutan bangsa, baik pada angkatan tua maupun generasi muda.

Korupsi, kolusi, penjarahan hutan, perampokan kekayaan alam, kebohongan terhadap publik, dan tindak kriminal lainnya, untuk kepentingan diri sendiri atau

¹ Paulo Freire. 2008. Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES. Cet VI. h. 75

² H.A.R. Tilaar. 2002 Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo. h. 101

³ H.A.R. Tilaar. 2000. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Integrasi Bangsa, Lembaga Manajemen-UNJ. h. 21

kelompok, adalah fenomena matinya rasa dan tidak adanya nalar untuk kepentingan bangsa. Sikap dan perilaku yang serakah dan arogan seperti ini telah menjadi sarat noda dalam kanvas negeri yang tak putus dirundung malang ini.

Situasi pendidikan di era reformasi kini juga bisa dibilang sangat memprihatinkan. Masalah klasik soal kurikulum, gedung sekolah yang rusak (bahkan sudah ambruk!), privatisasi perguruan tinggi, sertifikasi guru, termasuk juga ihwal polemik ujian nasional (UN) yang berkepanjangan. Sekolah yang semestinya memberikan harapan dan optimisme, malah menjadikan trauma dan keputusan bagi anak didiknya.

Pendidikan di negeri ini telah lama meninggalkan jiwa dan rohnya. Sebab, sistem dan praktek pendidikan dibangun dalam kerangka kapitalisme dan materialisme dengan pendekatan ekonomi dan jasa industri. Pendidikan tidak digagas dan dikelola menjadi sebuah dunia yang santun dan beradab bagi pengayaan nilai-nilai kemanusiaan dan pemekaran semangat kebangsaan. Kasus kekerasan perilaku asusila, kecurangan dalam UN, serta berbagai penyimpangan lainnya kerap terjadi di institusi pendidikan.

B. PEMBAHASAN

Rehumanisasi Pendidikan

Pada aras ini, pemasalahan yang kemudian muncul adalah ihwal ketidakjelasan orientasi dan urgensi dari pendidikan: ke mana peserta didik akan dibawa dan dibuat seperti apa. Tengoklah proses pembelajaran di sekolah atau kampus. Semuanya masih menerapkan sistem subjek-objek: guru atau dosen memosisikan diri sebagai pengajar; sedangkan peserta didik sebagai orang yang mesti diajar. Padahal, dalam sistem pendidikan dialogis-kritis, proses pembelajaran mestinya sama-sama menempatkan guru dan murid sebagai subjek, sehingga antarkeduanya bisa saling bertukar pikiran, saling belajar, dan mengkritisi.

Berlakunya system -- meminjam istilah Paulo Freire -- “pendidikan bergaya bank” di atas, menyebabkan pendidikan kita menjadi otoriter dan kaku: menempatkan pendidik sebagai pusat segala-galanya. Pendidik adalah penguasa dengan predikat sebagai orang yang “mahatahu”, kemudian berdiri di hadapan peserta didik seraya berkhotbah tentang doktrin-doktrin yang ia miliki.⁴

Sedangkan peserta didik hanya diposisikan sebagai konsumen pasif dan diatur dalam keadaan yang menakutkan. Sehingga, demokrasi dan nilai kebebasan bagi peserta didik itu pun diabaikan dalam prakteknya. Mereka dianggap sebagai objek yang patuh, mendengar, menghafal, dan terus dijejali dengan ilmu pengetahuan tanpa terjadi proses interaksi timbal balik atau dialog kritis.

Di noktah ini, wajar saja jika banyak kalangan berpandangan bahwa pendidikan kita hanya melulu berperan sebatas menyampaikan materi pelajaran dan belum berperan sebagai wahana untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kesalehan sosial.

Harus diakui, sistem pendidikan kolonial masih melekat kuat dalam pendidikan kita hari ini. Tengoklah, misalnya, bagaimana (maha)siswa didesain

⁴ Paulo Freire. 2008. Opcit, h. 80

sedemikian rupa menjadi manusia yang tak lain hanya dipersiapkan menjadi pelaksana setia pada pemerintah. Mereka hanya dijejali dengan ilmu pengetahuan yang dibagi dalam berbagai jurusan, tanpa dibekali dengan ilmu filsafat dan sosial-kemasyarakatan yang sebenarnya bisa menumbuhkan kritisisme mereka saat nanti terjun langsung ke masyarakat.

Mereka tidak dididik menjadi intelektual atau konseptor yang kreatif dan terampil untuk setiap saat melakukan telaah akan beragam masalah yang tengah menghimpit masyarakat bawah. Melainkan diukir menjadi robot yang patuh terhadap pelbagai keputusan yang datang dari penguasa.

Bahkan, hubungan antara guru dan siswa yang seharusnya bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain telah menjadi hubungan yang tak harmonis. Guru tak boleh menjadi teman setia bagi para murid. Karena itu semua akan menjurus ke arah dialog yang dapat menurunkan status hierarkis para guru selaku instruktur dan pihak pemberi kepandaian dan keterampilan yang sudah diseleksi.⁵

Sejarah panjang bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa pendidikan kita sangat penuh dengan pemasangan daya kreativitas dan kesadaran diri. Sehingga, segala perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terasa ada pengawasan yang teramat ketat dari pemerintah yang penuh dengan rasa curiga kepada warganya. Ini tak lain untuk meredam segala kritisisme masyarakat yang hendak melakukan perlawanan kepada Orde Baru.

Alhasil, pendidikan budi pekerti yang selalu diajarkan kepada (maha)siswa menjadi sebuah indoktrinasi yang penuh dengan keterpaksaan. Kesadaran yang tumbuh dari nilai kreatif manusia Indonesia pun menjadi tumpul. Justru, yang lahir adalah rasa dendam dan kepribadian yang serba pura-pura.

Inilah potret buram pendidikan kita yang mesti dilakukan penyelamatan dengan segera. Karena fokus utama pendidikan sebenarnya bermuara pada tumbuh-kembangnya kepribadian yang sadar diri dan sadar sosial sebagai pangkal kreativitas. Kualitas kepribadian ini tidak bisa diukur dan dicapai melalui undang-undang. Tapi lebih memberikan nilai kebebasan kepada siswa untuk memilih apa yang mereka sukai. Dan tugas guru adalah membimbing mereka agar bisa menentukan sikap yang benar dan berpikir kritis.

Pada aras ini, sistem pendidikan nasional bisa dikatakan belum mampu menyiapkan sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan sekaligus memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang luhur. Pendidikan nasional, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, lebih terfokus menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan daripada membentuk karakter bangsa (*character building*) pada diri mereka. Ini setidaknya disebabkan oleh minimnya bekal yang diberikan kepada (maha)siswa berupa semangat kebangsaan dan sifat-sifat kemanusiaan.

Selain itu, praktek komoditas menjadi realitas yang juga tak bisa didiamkan begitu saja. Sebab, praktek ini pun telah ikut memperparah kondisi pendidikan nasional yang sudah kian memprihatinkan. Ini tampak dari kebijakan pemerintah Indonesia yang telah menetapkan dunia pendidikan sebagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing dan menjadi bagian paket kebijakan

⁵ YB. Mangunwijaya. 1980. Paradigma Baru Pendidikan Rakyat. Prisma, No.7. h 11-12.

liberalisasi. Pada gilirannya, pendidikan bukan lagi sebagai proses yang mencerdaskan dan memanusiakan manusia, tetapi komoditas yang diperdagangkan.

***Arah Baru Pendidikan Agama;
Sebuah Tawaran***

Bersandar pada diskursus panjang di atas, jika harus dikorelasikan ke dalam sistem pendidikan agama, maka harus diakui bahwa pendidikan agama saat ini juga telah menjadi sebuah sistem yang bersifat ideologis-otoriter. Tidak ada nuansa dialog di sana. Bahkan, perdebatan untuk mencari titik temu (*kalimatun sawa*) ihwal beragam masalah penting dari agama-agama pun tidak pernah bersifat transparan. Pendidikan agama hanya diajarkan secara literer dan formalistik, sehingga wawasan pluralisme yang menjadi realitas empiris Indonesia juga tak tampak dengan jelas.

Ironisnya, pemikiran-pemikiran kritis yang acap tumbuh di lembaga pendidikan agama itu, yang mencoba mengapresiasi agama orang lain, misalnya, kerap dituding sebagai sesuatu yang menyesatkan dan mesti pasung keberadaannya. Sebab itu, mengharapkan sumbangan dari pendidikan agama untuk mendorong tumbuhnya sikap pluralis dapatlah dikatakan sebagai ilusi belaka.⁶

Di sisi lain, warisan kebobrokan rezim Orde Baru juga terasa masih melekat sangat kuat. Sebab, pendidikan agama terlihat lebih mengacu pada kepentingan politis-pragmatis. Para penguasa terlalu banyak mencampuri sistem pendidikan itu, sehingga apa yang disebut filsafat pendidikan nyaris tak terrefleksikan dalam setiap proses pembelajaran.

Ujung-ujungnya, secara langsung ataupun tak, pendidikan agama telah diantarkan menuju konflik kekerasan yang tidak kondusif bagi hubungan antar-agama. Pun tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan kita saat ini yang belum mampu memberikan ruang kebebasan bagi peserta didik untuk berpikir kritis dan menciptakan hal-hal baru.

Maka, di era globalisasi sekarang ini, setiap individu ataupun kelompok dalam ikatan organisasi sangatlah dituntut untuk belajar terus menerus dalam proses interaktif yang bermutu. Dengan kata lain, di samping kita dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, tentunya setiap individu juga mesti belajar agar mampu tinggal bersama-sama dalam masyarakat majemuk yang secara spiritual dapat memahami arti sesungguhnya dari hidup bersama dengan orang yang memiliki perbedaan agama, etnis, dan kelas sosial.⁷

Bersandar pada konstataasi di atas, seyogianya istilah pendidikan agama ditata kembali dan perlu diadakan penyegaran atau redefinisi. Sebab, istilah pendidikan selama ini agak sulit dirumuskan secara pasti karena kerap bermakna ganda. Terlebih lagi, pendidikan agama cenderung menampilkan wajah yang eksklusif dan dogmatis.

⁶ Syamsul Ma'arif. 2006. Pendidikan Pluralisme di Indonesia. Yogyakarta: Logung Pustaka. h. 57

⁷ H.A.R. Tilaar, 2004. Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural. Jakarta:, Indonesia Tera. h. 24

Akibatnya, cita-cita luhur untuk mencapai masyarakat majemuk yang harmonis, di mana perbedaan dan keanekaragaman agama-budaya mampu berfungsi sebagai sumberdaya yang dapat memperkaya pemekaran manusia dan peradaban, hingga kini masih jadi harapan.

Seharusnya pendidikan agama dapat dijadikan wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif-pluralis. Karena hanya dengan ini, menurut penulis, kekerasan antar-agama dan antar-etnis yang kerap membunyah di berbagai daerah Tanah Air, bisa diredam dengan segera.⁸

Mencermati realitas tersebut, pemikiran mengenai pentingnya pendidikan pluralisme, terutama bagi bangsa Indonesia yang majemuk, bukan alasan tanpa dasar pijakan. Karena pendidikan model ini sesungguhnya merupakan sarana yang sangat efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi pada peserta didik.

Perbedaan agama pada mereka bukanlah menjadi penghalang untuk bergaul dan bersosialisasi diri. Justru, pendidikan agama dengan peserta didik yang multiagama dapat dijadikan sarana untuk menggali dan menemukan nilai-nilai keagamaan pada agamanya masing-masing sekaligus dapat mengenal tradisi agama *the others*. Dengan demikian, pendidikan agama pada masa mendatang hendaknya tidak lagi ditujukan kepada siswa secara individu menurut agama yang dianutnya, melainkan secara objektif dan berdasarkan kepentingan bersama.⁹

Jika selama ini siswa memperoleh pelajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing, maka diusulkan agar setiap siswa menengah pertama sampai perguruan tinggi memperoleh materi agama yang sama, yaitu berisi tentang sejarah pertumbuhan semua agama yang berkembang di Indonesia. Sedangkan di SD diganti dengan pendidikan budi pekerti yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan secara universal.

Dengan materi seperti itu, di samping siswa dapat menentukan agamanya sendiri (bukan berdasarkan keturunan!), juga dapat memahami pluralitas berdasarkan pemikiran kritisnya, mengajarkan keterbukaan, toleransi, dan tidak eksklusif, tapi inklusif. Kemudian, diharapkan juga akan terbangun suasana saling menemani dalam kehidupan beragama secara dewasa: tidak ada yang superior dan inferior, serta terbentuknya suasana dialog yang memungkinkan membuka wawasan spiritualitas baru tentang keagamaan dan keimanan masing-masing peserta didik.

Melongok carut marutnya dunia pendidikan yang terurai secara gamblang di muka, menimbulkan sebuah pemikiran bahwa masa depan pendidikan di negeri ini masih belum bisa diraba dengan pasti. Karena proses di dalamnya tidak membiasakan siswa untuk selalu hidup bersama, setara, dan belajar menghargai orang lain; melainkan sebuah budaya yang sarat dengan perilaku menyimpang dan persaingan semata.

Tak pelak lagi, suramnya masa depan pendidikan kita salah satunya bermuara pada kian merambahnya ideologi kompetisi yang merupakan anak

⁸ Lihat QS An-Nahl: 125.

⁹ Th, Sumartana. 2005. Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. Jakarta: Interfide. h. 217

kandung dari kapitalisme. Dibukanya keran privatisasi perguruan tinggi dan makin berjamurnya sekolah-sekolah bertaraf internasional di berbagai daerah, menjadi bukti nyata bahwa persaingan dalam dunia pendidikan menjadi semakin kuat dan sangat sulit diretas.

Walhasil, relasi pendidikan dan agenda pembangunan bangsa, baik dalam narasi maupun dalam aksi gerakannya, merupakan sebuah entakan untuk meningkatkan harkat dan martabat kebangsaan serta membenahi sistem dan praktek pendidikan. Inilah tugas dan tanggung jawab bagi kaum intelektual dan cerdik-cendikia yang dipesankan Bung Hatta.

Maka, yang mesti diperhatikan pemerintah kini adalah bagaimana tujuan pendidikan yang diamanatkan pendiri bangsa ini dapat tercapai. Yaitu agar manusia dapat mengenal dirinya bahwa ia adalah subjek dan bukan objek yang bodoh. Pendidikan harus bisa membuat orang sadar dan melek bahwa mereka turut berperan dalam menentukan masa depan bangsa, membuat orang lebih manusiawi, lebih bijak, dan lebih adil.

Pendidikan harus mampu untuk mengeluarkan peserta didik dari kubangan kemiskinan ilmu pengetahuan dan membebaskan mereka dari ketimpangan sosial, ketidakadilan dalam setiap aspek kehidupan, serta keberpihakan pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu.

Begitulah, ingar bingar dunia pendidikan yang tengah terpampang lebar di depan kelopak mata kita. Pendidikan ternyata hanya menciptakan generasi yang sekadar mampu menghafal, tanpa bisa menalar sebuah realita. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi disparitas yang sangat jauh antara teori dan kenyataan. *Dus*, ilmu yang dipelajari di sekolah sangat bertolak belakang dengan realitas yang ada.

C. KESIMPULAN

Dari diskursus di muka, maka ada beberapa aspek pokok yang menjadi agenda semua pihak dalam mewujudkan pendidikan yang benar-benar bisa menjadikan manusia benar-benar merdeka.

Pertama, pendidikan mesti dirumuskan sebagai sebuah upaya untuk memberikan kesadaran kepada manusia bahwa mereka adalah makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri, dan karena itu mesti hidup berdampingan dengan orang lain. Kedua, pendidikan mesti didesain untuk merayakan kearifan lokal (*local wisdom*). Sebab, bangsa Indonesia memiliki beragam karakter dan kebudayaan, sehingga mesti dikembangkan dan dibumikan.

Ketiga, pendidikan agama yang kini telah masuk dalam semua kurikulum, mulai dari jenjang SD sampai PT, mesti dilakukan redefinisi dengan tidak hanya mengajarkan agama Islam *an sich*. Artinya, dalam proses pembelajaran, mesti juga diberikan pengetahuan tentang agama lain. Dan yang lebih penting, proses pembelajaran agama harus merayakan kemajemukan (pluralisme) dan kebhinekaan (multikulturalisme) serta menghindari adanya pemberian stigma terhadap agama-agama tertentu.

Akhirnya, mengafirmasi apa yang pernah ditegaskan Romo Mangunwijaya, bahwa sudah saatnya dunia pendidikan kita meninggalkan prosesnya yang kerap melakukan penyeragaman atas (maha)siswa. Karena selain membentuk pemikiran mereka yang malah terkotak-kotak, tidak kritis, dan tidak dewasa, juga

mengakibatkan dehumanisasi di dalamnya. Dan ini semua setidaknya berpangkal dari sistem komando yang terus dirayakan dalam dunia pendidikan.¹⁰

Maka, lanjut Romo Mangun, masalah mendesak yang mesti segera dibenahi adalah bukan sekadar perbaikan masalah teknis-didaktik-metodik, melainkan hal-hal yang bersifat ideologis-strategis-paradigmatis. Dan yang lebih penting, seorang guru atau dosen mesti menjadi pribadi yang humanis, karena ia menjadi titik tolak kepribadian (maha) siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Freire, Paulo. 2008. Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES, Cet. VI,
Ma'arif, Syamsul. 2006. Pendidikan Pluralisme di Indonesia. Yogyakarta: Logung Pustaka
Mangunwijaya YB. 1980. Paradigma Baru Pendidikan Rakyat. Prisma, No.7
Sumartana, 2005. Pluralisme. Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. Jakarta: Interfide
Tilaar, H.A.R. 2004. Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural. Jakarta: Indonesia-Tera
Tilaar, H.A.R. 2000. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Integrasi Bangsa. Lembaga Manajemen-UNJ
Tilaar, H.A.R. 2002. Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo

¹⁰ YB. Mangunwijaya, 1980, Opcit, h. 11-12